

Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022

Putro Nur Cahyo

e-mail: putro.nur.cahyo-2022@feb.unair.ac.id

(Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya)

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bondowoso selama periode 2018-2022. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan APBD Kabupaten Bondowoso dari tahun 2018 hingga 2022. Metode analisis yang diterapkan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang berfokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), khususnya dalam aspek analisis belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja belanja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam periode tersebut dinilai baik, dengan adanya upaya perbaikan yang terus dilakukan setiap tahun dalam penggunaan realisasi belanja. Pertumbuhan belanja mulai terlihat pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018-2019). Oleh karena itu, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan belanja daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian belanja yang tepat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi belanja di masa mendatang.

Kata kunci– Analisis Kinerja, Belanja, Laporan keuangan

ABSTRACT: The objective of the study is to assess the performance of budget realization concerning regional income and expenditure in Bondowoso Regency from 2018 to 2012. The research relies on secondary data obtained from the annual financial reports of Bondowoso Regency's Regional Budget (APBD) spanning from 2014 to 2018. Employing a qualitative descriptive analysis method, the study primarily focuses on the Budget Realization Report (LRA), particularly emphasizing expenditure analysis. The findings of the study reveal that expenditure recorded in the LRA for the years 2014-2018 indicate commendable performance by the Bondowoso Regency Government, showcasing continual enhancements in expenditure utilization annually. Noteworthy expenditure growth was observed in 2016 compared to the years 2014-2015. Consequently, it is recommended that in subsequent years, the Bondowoso Regency Government ensures a balanced allocation of regional resources in line with the requirements of regional development and community welfare. Such allocation of regional expenditure is expected to enhance future spending effectiveness, productivity, and efficiency.

Keywords – Analysis, Expenditure, Performance Report

PENDAHULUAN

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam mengukur kinerja keuangan dan pembangunan daerah serta mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Efektivitas realisasi APBD menjadi indikator keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dalam pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2019). Dalam kerangka otonomi daerah, APBD berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas (Bastian, 2017).

Penelitian sebelumnya banyak mengkaji aspek kinerja APBD. Rusmin et al. (2020) menemukan korelasi positif antara kondisi keuangan daerah dengan pembangunan berkelanjutan, sedangkan Prabowo et al. (2021) mengidentifikasi kendala dalam implementasi reformasi akuntansi publik di Indonesia. Sari dan Agusti (2021) meneliti pengaruh ketergantungan pemerintah pusat dan temuan audit terhadap kinerja keuangan daerah, sementara Suryanto dan Thalassinis (2021) menyimpulkan dampak positif desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya dengan fokus pada analisis komprehensif kinerja APBD Kabupaten Bondowoso selama 2018-2022. Tidak hanya menilai rasio keuangan, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian realisasi APBD dengan dokumen perencanaan serta capaian program. Kabupaten Bondowoso dipilih karena ketergantungannya pada dana perimbangan meskipun memiliki potensi sumber daya yang signifikan (BPS Kabupaten Bondowoso, 2022). Kondisi ini mencerminkan tantangan yang umum dihadapi banyak daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam dan objektif mengenai kinerja APBD serta tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan untuk mempercepat pembangunan daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada periode 2018-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik Sektor publik sering kali diartikan sebagai entitas yang berfokus pada kepentingan umum dan bertanggung jawab dalam penyediaan barang atau jasa untuk masyarakat luas, yang pembiayaannya berasal dari pendapatan negara, seperti pajak, retribusi, atau sumber pendapatan lainnya yang diatur oleh undang-undang. Menurut Bastian (2019:3), sektor publik mencakup berbagai kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan fokus utama pada layanan publik yang berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Kegiatan sektor publik ini umumnya dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan mencakup bidang-bidang seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, serta keamanan. Selain itu, organisasi nirlaba yang menjalankan fungsi publik, seperti badan amal atau lembaga swadaya masyarakat, juga dapat dianggap sebagai bagian dari sektor publik. Dengan demikian, sektor publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan anggaran yang diatur secara transparan dan akuntabel.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kinerja, menurut Mahmudi (2021:6), merupakan representasi tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi. Dalam konteks sektor publik, kinerja organisasi pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mencapai target pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, kinerja sektor publik menggambarkan seberapa efektif dan efisien lembaga pemerintahan dalam memberikan layanan publik serta mencapai tujuan strategis yang ditetapkan dalam rencana kerja tahunan maupun jangka panjang.

Pengukuran kinerja (performance measurement) merupakan aspek penting yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja suatu organisasi telah memenuhi target yang ditentukan. Pengukuran ini, seperti yang dijelaskan oleh Halim dan Kusufi (2020:127), tidak hanya digunakan untuk mencatat pencapaian program atau kebijakan, tetapi juga sebagai alat untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pengukuran kinerja sektor publik dapat dilakukan dengan berbagai metode, baik yang bersifat kuantitatif seperti penilaian berbasis anggaran dan output

layanan, maupun kualitatif seperti survei kepuasan publik. Dalam praktiknya, pengukuran kinerja memberikan masukan yang penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta mendorong akuntabilitas publik.

Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah cabang akuntansi sektor publik yang fokus pada pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Menurut Sujarweni (2020), akuntansi ini mencakup proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan daerah, mulai dari penerimaan pajak hingga belanja publik. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat bagi pemangku kepentingan seperti masyarakat, auditor, dan pembuat kebijakan, untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan transparan.

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memastikan konsistensi laporan keuangan antar daerah dan mendukung fungsi akuntansi keuangan daerah sebagai alat evaluasi internal dan pertanggungjawaban publik. Transparansi dalam pelaporan juga meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang penting untuk membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa keuangan daerah mencakup semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Ini termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Mardiasmo (2021:23) juga menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan *good governance* di tingkat pemerintahan lokal. Pengelolaan ini mencakup tidak hanya pengelolaan penerimaan daerah, seperti pajak daerah dan retribusi, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah mengelola belanja daerah agar efisien dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo, penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kebijakan fiskalnya secara terbuka.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pendapatan adalah semua penerimaan rekening atas kas umum negara/daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari kedua definisi tersebut, terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. Kelompok pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (PPKD) meliputi: (1) Pendapatan asli daerah, (2) dana perimbangan, (3) pendapatan daerah lain yang sah.

Sementara itu, belanja daerah, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. VARIAN PENDAPATAN

Analisis varian anggaran pendapatan dilakukan dengan menghitung selisih antara pendapatan yang dianggarkan dan pendapatan yang direalisasikan. Biasanya, selisih ini sudah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Secara prinsip, pendapatan yang ditargetkan dalam anggaran harus dicapai oleh pemerintah daerah (Halim & Kusufi, 2023:78).

$$\text{Varian Pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$$

2. PERTUMBUHAN PENDAPATAN

Menurut Firdaus et al. (2022:87), analisis pertumbuhan pendapatan memiliki kegunaan dalam mengevaluasi apakah kinerja anggaran pemerintah daerah selama periode anggaran tertentu mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan. Peningkatan yang konsisten dari waktu ke waktu diharapkan, sementara penurunan menandakan adanya masalah dalam pendapatan yang perlu diatasi.

Pertumbuhan pendapatan dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Thn } t = \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn } (t - 1)}{\text{Pendapatan Thn } t}$$

3. RASIO EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Menurut Halim dan Kusufi (2021:234), Rasio efektivitas dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Total Pendapatan daerah} \times 100\%}$$

Analisis Kinerja Belanja Daerah

1. ANALIS VARIAN BELANJA

Firdaus et al. (2021:87) menjelaskan bahwa dalam konteks belanja, anggaran belanja berfungsi sebagai batas maksimum pengeluaran yang diizinkan bagi pemerintah daerah. Kinerja belanja pemerintah daerah dinilai baik apabila realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Untuk mengevaluasi perbedaan antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah disusun, digunakan analisis varian. Sejalan dengan itu, Ritonga (2023:156) menekankan bahwa analisis varian belanja merupakan instrumen penting dalam menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi dasar untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di periode mendatang.

Analisis varian membantu mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan antara anggaran dan realisasi, yang dikenal sebagai varian positif atau negatif. Jika realisasi belanja lebih rendah dari anggaran, hal ini disebut sebagai varian positif, yang umumnya dianggap baik karena menandakan efisiensi penggunaan anggaran. Sebaliknya, jika realisasi belanja melebihi anggaran yang telah ditetapkan, maka terjadi varian negatif, yang menunjukkan adanya pengeluaran berlebih dan dapat dianggap sebagai sinyal potensi masalah dalam pengelolaan anggaran.

$$\text{Varians Belanja} = \frac{\text{Anggaran Belanja} - \text{Realisasi Belanja}}{\text{Analisis Keserasian Belanja}}$$

2. ANALISIS BELANJA OPERASI TERHADAP TOTAL BELANJA

Menurut Firdaus et al. (2023:156) menjelaskan bahwa dalam konteks belanja, terdapat ketentuan bahwa anggaran belanja adalah batasan tertinggi dari pengeluaran yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Kinerja belanja pemerintah daerah akan dianggap baik jika realisasi belanja tidak melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Analisis varian digunakan untuk mengevaluasi perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang telah disusun.

Rasio belanja operasi merupakan indikator kunci dalam menilai seberapa besar anggaran pemerintah daerah yang digunakan untuk aktivitas operasional dibandingkan dengan total belanja daerah. Rasio ini dapat membantu memberikan gambaran tentang alokasi anggaran, apakah lebih banyak difokuskan untuk kebutuhan rutin atau untuk investasi jangka panjang, seperti belanja modal. Rasio yang terlalu tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran habis untuk belanja rutin, yang mungkin kurang mendukung pengembangan infrastruktur atau investasi yang bersifat jangka panjang. Sebaliknya, rasio yang terlalu rendah mungkin menandakan kekurangan alokasi untuk mendukung operasi rutin yang penting bagi keberlangsungan pelayanan publik.

Rasio belanja operasi dapat dihitung dengan rumus:

$$RBOTB = \frac{\text{RasioBelanjaOperasix } 100\%}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun, dibahas, dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dalam Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Kemenkeu RI-DJPK) tahun 2014 (halaman 36), disebutkan bahwa APBD adalah implementasi tahunan dari rencana jangka panjang dan rencana jangka menengah daerah yang dibuat berdasarkan visi dan misi kepala daerah. APBD disusun oleh pemerintah daerah, dibahas, dan disetujui oleh DPRD sehingga pada akhirnya menjadi produk hukum dalam bentuk peraturan daerah yang mengikat seluruh lembaga di daerah tersebut..

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Halim & Kusufi, 2021:312).

Menurut Firdaus et al. (2023:189), LRA berfungsi sebagai alat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran publik. Melalui laporan ini, pemerintah dapat menunjukkan tanggung jawabnya atas pengelolaan dana publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, LRA juga membantu dalam proses evaluasi pelaksanaan anggaran, di mana pencapaian target-target keuangan dapat diukur dan dianalisis untuk menentukan langkah-langkah perbaikan di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell dan Poth (2018:45), bahwa metode penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretif dan konstruktivis. Pendekatan ini cocok untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti menjadi instrumen kunci dalam proses pengumpulan dan analisis data. Salah satu ciri utama dari metode kualitatif adalah penggunaan triangulasi dalam pengumpulan data, yang merupakan gabungan dari berbagai teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan validitas data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Data LRA menjadi dasar utama dalam memahami dan menganalisis bagaimana realisasi anggaran dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan, serta untuk mengidentifikasi perbedaan atau varians yang terjadi. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi objek penelitian, di mana peneliti mengumpulkan data dari LRA serta didukung oleh berbagai literatur yang relevan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian, seperti kinerja anggaran, efisiensi belanja, dan pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademik dan studi sebelumnya yang relevan untuk memberikan konteks dan landasan teoretis dalam menganalisis hasil penelitian. Kombinasi antara data lapangan dan literatur memungkinkan penelitian ini untuk memberikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap topik yang diteliti.

PEMBAHASAN

Analisis Varians Pendapatan

Analisis Varians Pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah:

Tabel 1 Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Presentase
2018	1.371.207.158.276	1.406.344.009.251,58	35.136.850.975,24	102,56
2019	1.693.863.376.704	1.667.009.472.595,80	-26.853.904.108,07	98,41
2020	1.759.601.699.590	1.758.238.494.284,91	-1.363.205.304,74	99,92
2021	1.817.327.578.705	1.844.824.793.880,72	27.497.215.175,88	101,51
2022	1.904.753.604.911	1.915.681.465.642,19	10.927.860.731,19	100,57
Rata-rata			9.068.963.493,90	100,60

Data menunjukkan fluktuasi dalam realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso selama periode lima tahun. Pada tahun 2018, realisasi pendapatan melebihi anggaran sebesar

Rp35.136.850.975,24 atau 102,56% dari anggaran, sedangkan tahun 2019 mengalami defisit dengan realisasi 98,41% dari anggaran. Rata-rata persentase realisasi terhadap anggaran selama lima tahun adalah 100,60%.

Menurut Mahmudi (2019:135), fluktuasi dalam realisasi pendapatan dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro dan perubahan kebijakan pemerintah pusat dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Sementara itu, faktor internal seperti kapasitas pemungutan pajak dan retribusi daerah juga berperan penting.

Lebih lanjut, Halim (2020:78) menyatakan bahwa pencapaian realisasi pendapatan di atas 100% tidak selalu menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini bisa mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan anggaran. Sebaliknya, realisasi di bawah 100% bisa menunjukkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya daerah.

Dalam konteks Kabupaten Bondowoso, rata-rata realisasi 100,60% menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam mencapai target pendapatan. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Ritonga (2021:203), pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab fluktuasi tersebut untuk meningkatkan akurasi perencanaan anggaran di masa mendatang.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Berikut hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan:

Tabel 2 Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Pertumbuhan (%)	Total Pendapatan Daerah (TAD) (Rp)	Pertumbuhan (%)
2018	118.333.053.456,90	113,02	18.700.743.207,17	102,56
2019	153.766.975.771,59	92,5	-14.005.013.379,66	98,41
2020	140.940.070.927,82	122,13	37.863.319.273,75	99,92
2021	162.081.081.566,96	96,93	-6.036.632.481,32	101,51
2022	186.393.243.802,00	82,12	-40.471.946.762,71	100,57

Tabel 2 menggambarkan fluktuasi pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah (TAD) Kabupaten Bondowoso periode 2018-2022. Pertumbuhan PAD yang tidak konsisten mengindikasikan adanya ketidakstabilan dalam penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Meskipun terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2018 sebesar 113,02%, angka pertumbuhan ini mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya, khususnya pada 2022 ketika hanya tumbuh sebesar 82,12%.

Menurut Mardiasmo (2018:132), fluktuasi PAD dapat disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas administrasi perpajakan daerah, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi makro dan perubahan regulasi. Sejalan dengan itu, Mahmudi (2020:85) menekankan bahwa penurunan pertumbuhan PAD dapat mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap strategi penggalan potensi pendapatan daerah.

Di sisi lain, Total Pendapatan Daerah (TAD) menunjukkan kinerja yang lebih stabil meskipun juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, pertumbuhan TAD mencapai 102,56%, melampaui target anggaran, namun menurun menjadi 98,41% pada tahun 2019. Halim (2021:176) menjelaskan bahwa fluktuasi dalam realisasi TAD dapat mencerminkan tantangan dalam perencanaan anggaran yang akurat serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan.

Meskipun demikian, pada tahun 2021, TAD kembali mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan 101,51%, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 100,57%. Ritonga (2022:209) berpendapat bahwa tren fluktuatif ini menunjukkan perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya penguatan strategi fiskal yang lebih konsisten dan terarah. Sebagaimana diungkapkan oleh Suhadak dan Nugroho (2019:145), pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif dalam menggali potensi PAD dan mengoptimalkan pengelolaan TAD untuk mencapai kinerja pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 3 Perhitungan Derajat Desentralisasi Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp)	Total Pendapatan Daerah (TPD) (Rp)	Rasio %	Kinerja
2018	1.406.344.009.251,58	137.033.796.664,07	10,14	Kurang baik
2019	1.667.009.472.595,80	139.761.962.391,93	11,31	Kurang baik
2020	1.758.238.494.284,91	178.803.390.201,57	9,85	Tidak baik
2021	1.844.824.793.880,72	156.044.449.085,64	11,32	Kurang baik
2022	1.915.681.465.642,19	145.921.297.039,29	12,07	Kurang baik
Rata-rata			10,94	Kurang baik

Rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bondowoso pada periode 2018–2022 menunjukkan kemandirian fiskal daerah yang relatif rendah, dengan nilai rasio berkisar antara 9,85% hingga 12,07%, dan rata-rata 10,94%. Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) masih berada di bawah 15%, yang merupakan indikator ketergantungan daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2021), idealnya, sebuah daerah dianggap mandiri jika memiliki rasio di atas 20%. Namun, rendahnya rasio yang diperoleh Bondowoso dalam lima tahun ini mengindikasikan minimnya kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan daerah, di mana pada empat tahun berturut-turut kinerja desentralisasi masuk dalam kategori “kurang baik”, dan pada 2020 tercatat sebagai “tidak baik” dengan rasio 9,85%.

Peningkatan nominal PAD yang tercatat setiap tahun, meskipun positif, belum berhasil meningkatkan derajat kemandirian fiskal daerah secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber-sumber PAD yang ada belum dikelola dengan optimal untuk mendukung otonomi fiskal. Sebagaimana dijelaskan oleh Riyadi (2017), rasio desentralisasi yang rendah menunjukkan

ketergantungan pada Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat, serta menunjukkan efektivitas yang masih terbatas dalam penggalan potensi PAD. Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal sebagai penopang kemandirian fiskal perlu menjadi perhatian utama, karena kegiatan ekonomi produktif berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Kinerja fiskal yang belum optimal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya diversifikasi dalam sumber-sumber PAD dan terbatasnya kebijakan pengelolaan potensi ekonomi daerah yang terintegrasi. Rendahnya rasio derajat desentralisasi Kabupaten Bondowoso pada periode ini memperlihatkan bahwa meski PAD meningkat, tingkat kemandirian daerah dalam membiayai anggarannya sendiri masih tergolong rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso selama periode 2018-2022 menunjukkan hasil yang cukup baik dalam beberapa aspek, namun masih memerlukan peningkatan di aspek lainnya. Dari sisi pendapatan, Kabupaten Bondowoso berhasil mencapai dan bahkan melampaui target anggaran, dengan pertumbuhan pendapatan yang positif dan tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada.

Sementara itu, dari sisi belanja, kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso menunjukkan pengelolaan anggaran yang efektif dan bertanggung jawab, dengan realisasi belanja yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Namun, terdapat catatan penting terkait keserasian belanja, terutama dalam hal alokasi belanja modal yang masih belum optimal. Meskipun demikian, efisiensi belanja daerah secara keseluruhan dapat dikategorikan baik, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran secara bijaksana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah, terutama melalui peningkatan pajak daerah dan retribusi, serta revitalisasi pasar untuk meningkatkan transaksi ekonomi lokal. Selain itu, perlu adanya peningkatan alokasi dan realisasi belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Penting juga bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan sektor primer dengan sektor industri pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso. (2022). *Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2022*. Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Brusca, I., Gómez-Villegas, M., & Montesinos, V. (2016). Public financial management reforms: The role of IPSAS in Latin-America. *Public Administration and Development*, 36(1), 51-64.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Firdaus, N., et al. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firdaus, N., et al. (2022). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firdaus, N., et al. (2023). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2019). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.

- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jorge, S., & de Jesus, M. A. (2020). Relevance of IPSAS for transparency in government financial reporting. *International Journal of Public Administration*, 43(4), 292-304.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2014). *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jakarta: Kemenkeu RI-DJPK.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2021). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Prabowo, T. J. W., Leung, P., & Guthrie, J. (2021). Reforms in public sector accounting and budgeting in Indonesia (2003-2015): Confusions in implementation. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 33(1), 38-57.
- Ritonga, I. T. (2021). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritonga, I. T. (2022). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Riyadi, S. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rusmin, R., Astami, E. W., & Scully, G. (2020). Local government financial condition and sustainable development: Evidence from Indonesia. *Sustainability*, 12(3), 1233.
- Sari, D. P., & Agusti, R. (2021). Pengaruh Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Temuan Audit BPK dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 67-80.
- Suhadak, & Nugroho, T. (2019). *Paradigma Baru Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suryanto, T., & Thalassinou, E. I. (2021). Fiscal decentralization and economic growth: Lessons from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(3), 114.
- van Helden, G. J., & Reichard, C. (2019). A global view on public sector accounting harmonization: A critical analysis of IPSAS. *Public Money & Management*, 39(5), 321-326.